

DAFTAR PUSTAKA

- Hana, S. (2021). Analisis Faktor Kondisi Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dan Fasilitas Terhadap Kelayakan Bus Trans Semarang (Studi Kasus Bus Trans Semarang).
- Hasdi, R. (2010). Analisis Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bus Pada PO. Siliwangi Antar Nusa (SAN) DI Pekanbaru.
- Ilham. (2020). Sistem Pengendalian Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di ITJEN PKTL Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Ina, M. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.
- Kementerian Keuangan. (2012). Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Mariyatul Kiptiyah, D. S. (2012). Analisis Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Pada Pemerintah Kota Pekalongan.
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah.
- Mohammad Faizal Amir, M. D. (2016). Mekanisme Pemeliharaan Aset dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.
- Musni Syahputra, D. S. (2012). Evaluasi Implementasi Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- Naria, I. (2020). Tinjauan Atas Penatausahaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Proposal KTTA*.
- Pemerintah Kabupaten Blitar. (2012, Juni 11). *Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Diambil kembali dari <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-ppkad/>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021, Juni 04). *Visi Misi Kota Surabaya*. Diambil kembali dari [surabaya.go.id: https://surabaya.go.id/berita/60539/visi-misi-kota-surabaya](https://surabaya.go.id/berita/60539/visi-misi-kota-surabaya)
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 80 Tahun 2010 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BPKAD Kota Surabaya. Surabaya.
- Republik Indonesia. (t.thn.). Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.
- Romas, M. F. (2019). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- Sucahyo, R. E. (2020). Tinjauan Atas Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Bendahara SMA Negeri 11 Surabaya. *Proposal KTTA*.
- Suwarso, W. A. (2013). Pengamanan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Instansi Pemerintah.
- Syahrul, S. F. (2021). Implementasi Tanggung Jawab Pemeliharaan BMD Pemerintah Kota Pekanbaru (Berdasarkan Peraturan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Dan Daerah). 161.
- W, T. S. (2020). Tinjauan Atas Penatausahaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara Di Resimen Induk Kodam IV Diponegoro. *Proposal KTTA*.
- Wijito, L. (2016). *Materi Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Negara*.
- Wikipedia. (2022, Januari 30). *Pemerintah Kota Surabaya*. Diambil kembali dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Kota_Surabaya
- Wiwi Surianti Said, B. S. (2019). Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di RSUP. dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 7.